



Bordersea: Jejaring, Kultur, dan Relasi Agama

Uswatun Hasanah¹, Agus Mahfudin Setiawan², Muhammad Nur Ichsan Azis³

¹Universitas Islam Negeri Lampung E-Mail: hasanah@radenintan.ac.id

²Universitas Islam Negeri Lampung Email: agus.mahfud@radenintan.ac.id

³Badan Riset Inovasi Nasional, Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban E-Mail: muha276@brin.go.id

ARTICLE INFORMATION

Submitted: 22nd Oktober 2022

Review: 22nd Juni 2023

Accepted: 26th Juni 2023

Published: 29th Juni 2023.

KEYWORDS

Border Issue, Culture, Network

CORRESPONDENCE

E-Mail: muha276@brin.go.id

A B S T R A C T

Border issues are an interesting study among academics. After Susi Pudjiastuti, the former Minister of Maritime Affairs and Fisheries, was overhauled, attention to border studies has increasingly come to the fore. The government is becoming less focused on border discourse, so that identity discourse emerges within the borders of the state and culture today. This article attempts to analyze border discourse within the scope of the history and culture of the people. The historical method used in this research is a socio-economic approach that intersects with the process and axis of networks, culture, and identity formation. The border area is a place for the community to express and interpret their communal identity. The results of this study indicate that historical processes have implications for the emergence of cultural groups and ethnic identities in society. The Sulawesi Sea acts as a connecting area between countries, nations, in terms of history and culture, so that this study is expected to contribute to the study of the border areas of the two countries and nations.

A. PENDAHULUAN

Kenneth R. Hall menuliskan bahwa jejaring niaga maritim global menghubungkan hampir seluruh wilayah di dunia dan berimplikasi pada penemuan dan pembukaan wilayah baru hingga pembentukan kelompok sosial.¹ Dalam aktivitas tersebut, aspek pendorong utama adalah ekonomi, namun pada kondisi tertentu aspek lainnya turut mendorong akselerasi aktivitas perniagaan yang dilakukan oleh kelompok pelaut-peniaga, termasuk aspek sosial dan ideologi. Akibatnya jejaring tersebut mengarah

pada integrasi dan interkoneksi kelompok masyarakat dari berbagai kawasan, etnis, hingga agama².

Dalam konteks Nusantara, kajian jaringan dan sejarah maritim ditemukan dalam beberapa karya akademis seperti Lopian (2018)³ dan Poelinggomang (2016)⁴ yang menunjukkan bahwa jaringan maritim merupakan salah satu aspek pembentukan masyarakat Nusantara sampai pada abad ke-20.

Di Nusantara, Maluku adalah tujuan utama dalam jaringan maritim karena produksi rempah-rempah yang terkenal hingga ke Asia, Afrika dan Eropa⁵. Hal ini dibuktikan ketika

¹ K. R. Hall. (2019a). Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia. In *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv9zckps>; K. R. Hall & A. Reid. (1994). Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 37(3). <https://doi.org/10.2307/3632261>

² D. Lombard. (2005). Nusa Jawa: Silang budaya: Kajian Sejarah Terpadu, bagian I. In *Le Carrefour Javanais*.

³ A. B. Lopian. (2018). Peta pelayaran Nusantara dari Masa ke Masa. *Buletin Al-Turas*, 2(3). <https://doi.org/10.15408/bat.v2i5.6764>

⁴ E. L. Poelinggomang. (2016). Makassar Abad XIX. In *Makassar Abad XIX*.

⁵ R. Shumway. (2005). Jack Turner, Spice: The History of Temptation. New York, NY: Alfred A. Knopf, 2004. 384

orang-orang Eropa berhasil membuka jalan ke kawasan Timur melalui penaklukan kembali wilayah-wilayah strategis dari orang-orang Asia Barat, Islam. Perjanjian Tordesillas dan Zaragoza⁶ menjadi titik balik dalam aktivitas niaga maritim dunia dengan tujuan utama pusat rempah.

Kawasan Nusantara yang terhubung oleh laut kemudian membangun peradaban maritim melalui jaringan niaga rempah dan komoditas lainnya sampai abad ke-20. Secara periodik, sejak abad ke-13 dominasi ekonomi yang berlangsung cukup berperan penting untuk kawasan pesisir. Pada abad ke-17, dominasi tersebut bergeser karena pengaruh Eropa yang berusaha merebut dominasi dalam jaringan rempah global dari para pedagang Asia dan Melayu di kawasan bandar-bandar penghubung internasional. Di Abad ke-18 hingga abad ke-20 dominasi Eropa mampu menggeser para pelaut-peniaga di Nusantara melalui hegemoni politik dan penguasaan atas beberapa kawasan penting dalam jalur niaga maritim di Nusantara.

Salah satu kelompok yang dikenal pada masa itu adalah para pelaut-peniaga dari etnik 'Moor'⁷ yang oleh pedagang Eropa dianggap sebagai kelompok pedagang 'Muslim' dari Afrika dan Asia. Mereka kemudian dikenal sebagai kelompok yang aktif di kawasan pesisir pantai di Nusantara bersama para pedagang dari India, Cina, dan Arab. Di Kawasan Selat Sulu, Kesultanan Jolo, dan Laut Sulawesi

mereka dikenal Bangsa Moro⁸ pada abad ke-19 M sebagai bangsa yang aktif dalam jejaring niaga maritim hingga abad ke-20 M. Akibat keberadaan mereka, daerah tersebut kemudian dikenal sebagai ruang terbuka dalam menyebarkan pengaruh ekonomi, politik, sosial hingga keagamaan kepada penduduk lokal di kawasan pesisir. Indikasi pertumbuhan dan perkembangan agama, relasi masyarakat, jaringan komunal di kawasan Laut Sulawesi terhubung dengan aktivitas jaringan niaga yang terbentuk di masa lalu. Warisan aktivitas tersebut kemudian mempengaruhi proses pertahanan tradisi dan budaya yang bersinggungan dengan keagamaan di antara masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan. Penyebaran pengaruh Katolik memperkuat bahwa jaringan keagamaan bertumbuh di daerah perbatasan, antara Filipina dan beberapa pulau kecil di Sulawesi Utara. Di sisi lain, tradisi lisan dari peran tokoh agama juga mempengaruhi perkembangan agama di kawasan perbatasan seperti yang

pp. ISBN: 0-375-40721-9 (hbk); 0-375-70705-0(pbk).
Itinerario, 29(3).

<https://doi.org/10.1017/s0165115300010615>

⁶ Dua perjanjian ini merupakan traktat yang disepakati oleh Portugis dan Spanyol di abad XV dan XVI yang berhasil menguasai jalur perdagangan rempah di dunia. Tordesillas adalah salah suatu perjanjian yang ditandatangani oleh Spanyol dan Portugis di pada 7 Juni 1494. Isi dari perjanjian itu ialah membagi dunia di luar Eropa menjadi dua bagian jalur pelayaran, Timur dan Barat, dimana pelayaran ke Timur milik Portugis dan Barat milik Spanyol. Sedangkan Zaragoza perjanjian yang menekankan kembali wilayah kekuasaan dari keduanya di mana dunia dibagi menjadi dua antara sepanjang meridian 1550 km di mulai dari Tanjung Verde (lepas pantai barat Afrika), sekitar 39°53'BB. Spanyol mendapat bagian sebanyak 370° liga milik Spanyol dan sebanyak 284° milik Portugis.

⁷ D. M. Noon, (1993). Moro piracy during the Spanish period and its impact. *Southeast Asian Studies (Kyoto)*, 30(4). https://doi.org/10.20495/tak.30.4_401

⁸Sejarah mencatatkan bahwa kelompok Moro mulai dikenal ketika umat Islam menjadi penguasa di tanah Andalusia. Istilah Moro berasal dari kata "Moriscos" ketika umat Islam di Andalusia mulai membaur dengan masyarakat setempat yang mayoritas beragama Kristen dan Yahudi. Moriscos disebutkan untuk pertama kalinya setelah Granada benar-benar ditaklukkan oleh Ferdinand dan rakyatnya. Moriscos berasal dari penyebutan orang Romawi, Phoenix, terhadap bangsa Mauritania yang mereka sebut "Mauri". Istilah ini kemudian bertahan dalam bahasa Spanyol menjadi *Moro*, dan *Moor* untuk bahasa Inggris, dan orang Spanyol memasukkan mereka sebagai kelompok "Berber" Muslim, dan pada akhirnya penyebutan Moro masih bertahan di sebagian daratan Filipina hingga sekarang. *El Ultimo Suspiro del Moro*, "Desahan Terakhir Sang Moro" adalah istilah yang semakin menguatkan identitas Moro di Spanyol. Lihat Hitti, *History of the Arab.....*, hlm. 706. Andaya dan Amal membedakan istilah antara Moro dan Moor. Keduanya memberikan interpretasi berbeda mengenai Moro dan Moor dimana Moro lebih dikenal dengan nama sebuah pulau dan kelompok masyarakat yang hidup di Pulau Moro yang berada di sebelah utara Maluku. Lebih spesifik lagi ketika seorang rahib Spanyol, Xavier, dikirim untuk melakukan kristenisasi di Nusantara dengan tujuan Pulau Moro. Lebih lanjut baca Leonard Y. Andaya, *Dunia Maluku Indonesia Timur Pada Zaman Modern Awal*, terj. Septian Dhaniar Rahman, (Yogyakarta: Ombak, 2015) dan M. Adnan Amal, *Portugis dan Spanyol di Maluku*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010).

dilakukan oleh Gumansalangi⁹ atau Samansialang, Syam Syah Alam, *Mawu Masade'*, dianggap menjadi penghubung dalam relasi agama masyarakat perbatasan di masa kini¹⁰.

Agama dan relasi keagamaan di kawasan Laut Sulawesi terhubung dengan aktivitas masyarakat dalam jaringan niaga maritim. Lopian (2009)¹¹ mengindikasikan bahwa peran agama dan para tokoh agama menjadi salah satu faktor terbentuknya relasi dan jaringan niaga di kawasan Laut Sulawesi hingga Selat Maluku. Hal ini kemudian diperkuat ketika para pelaut-peniaga membangun jejaring masyarakat hingga awal abad ke-20. Akibatnya muncul jaringan dan kelompok masyarakat yang saling terhubung di kawasan Laut Sulawesi berdasarkan agama, budaya dan tradisi yang melingkupinya.

Secara spesifik, kawasan Laut Sulawesi adalah *entrepot* dan *melting point* yang menghubungkan daratan Maluku, Sulawesi, dan Filipina dalam jaringan niaga di masa lalu¹². Para penguasa lokal memanfaatkan kondisi tersebut tidak hanya untuk memperkuat perekonomian, namun juga penyebaran ideologi yang terjalin melalui relasi pedagang yang datang secara silih-berganti¹³. (Andaya & Andaya, 2015; Niel & van Leur, 1956)

Dari kondisi di atas, Nusantara setidaknya memiliki beberapa kawasan penting dalam

jaringan niaga maritim Nusantara yang tidak hanya terfokus pada Malaka dan Maluku, namun juga berada pada jalur Laut Sulawesi sebagai salah satu daerah penghubungnya. Pandangan ini kemudian didukung oleh Lopian (Lopian, 2004b) yang menempatkan Kawasan Laut Sulawesi sebagai *heartsea* untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Selatan Filipina. Dampaknya, kawasan tersebut menjadi pos niaga yang ramai dikunjungi dan membentuk jaringan sosial di masa kemudian.

Kajian kawasan Laut Sulawesi di abad ke-19 memperkuat terbentuknya jejaring dan relasi sosial di tengah masyarakat. Salah satu kajian yang monumental yang membahas jejaring Niaga dan relasi di tengah masyarakat ialah Lopian (2009)¹⁴ dimana dia menyebut dampak dari jejaring niaga yang terbentuk selama ini berimplikasi pada kondisi kultur masyarakat. Selain Lopian menunjukkan adanya aktivitas *Orang Laut*, *Bajak Laut*, dan *Raja Laut*, dia juga menyinggung tradisi dan kultur masyarakat yang mendiami kawasan Laut Sulawesi. Selanjutnya kajian lain yang menunjukkan relasi Selat Sulu dan Laut Sulawesi sebagai ruang terbuka bagi masyarakat dan para pelaut di kawasan tersebut.¹⁵ Selain itu, Warren juga meunjukkan bahwa pengaruh perniagaan maritim membentuk identitas dan entitas sebuah masyarakat 'baru' yang dikenal sebagai masyarakat pelaut yang mempertahankan tradisi dan kultur bahari.

Selain proses sejarah yang panjang, kondisi tersebut juga berimplikasi pada persoalan entitas dan identitas kebangsaan di kawasan perbatasan. Misalnya Riwanto¹⁶, Ulaen¹⁷,

⁹ Salmin Djakaria. (2016). *Kisah Gumansalangi alias Medellu: tradisi lisan melintas-batas di Kabupaten Kepulauan Sangihe* Yogyakarta: Amara Books.

¹⁰ Muh Nur Ichsan A. (2015). *Sejarah Islam di Perbatasan: Islam Masade' di Kepulauan Sangir*, Yogyakarta: Kepel Press.

¹¹ A. B. Lopian. (2009) *Orang laut - bajak laut - raja laut: sejarah kawasan laut Sulawesi abad XIX* Jakarta: Komunitas Bambu,

¹² R. H. Fritze & R. S. Love. (2007). Maritime Exploration in the Age of Discovery, 1415-1800. *The Sixteenth Century Journal*, 38(4). <https://doi.org/10.2307/20478689>

¹³ B. W. Andaya & L. Y. Andaya. (2015). A History of Early Modern Southeast Asia, 1400-1830. In *A History of Early Modern Southeast Asia, 1400-1830*. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139051323>; R. Van, Niel & J. C. van Leur. (1956). Indonesian Trade and Society. Essays in Asian Social and Economic History. *The Far Eastern Quarterly*, 15(3). <https://doi.org/10.2307/2941894>

¹⁴ Lopian 2009.

¹⁵ W. E. Cheong & J. F. Warren. (1982). The Sulu Zone, 1768-1898: The Dynamics of External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State. *The American Historical Review*, 87(5). <https://doi.org/10.2307/1857050>

¹⁶ R. Tirtosudarmo. (2014). Kalimantan Barat sebagai 'Daerah Perbatasan': Sebuah Tinjauan Demografi-Politik. *Antropologi Indonesia*, 0(67). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i67.3427>

¹⁷ A. J. Ulaen.. (2017). LAUT YANG MENYATUKAN: MENGUNGKAP RUANG-JEJARING LAUT MALUKU. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 12(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.34050/jlb.v12i2.3046>

Pristiwanto¹⁸ yang semua menyentil persoalan perbatasan, terutama persoalan kewilayahan dan demografi penduduk, serta sedikit bersinggungan dengan beberapa kebijakan pemerintah dalam memposisikan entitas dan identitas masyarakat kawasan perbatasan. Menariknya, kawasan perbatasan yang dimunculkan dalam perspektif ini adalah kawasan perbatasan laut, *bordersea*, yang terbentuk melalui beberapa perjanjian dan kebijakan dari dua negara yang bertetangga, Indonesia-Filipina.

B. METODE

Tulisan ini merupakan kajian sejarah yang berusaha mendeskripsikan, menganalisa, dan mengungkapkan jaringan niaga dan pembentukan relasi di tengah masyarakat Nusantara hingga abad ke-20. Kuntowijoyo mengungkapkan terdapat empat tahapan dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. Pengumpulan data (heuristik), kritik, interpretasi dan eksplanasi, serta historiografi. Lebih lanjut, peristiwa sejarah tidak hanya bertumpu pada periodisasi waktu semata, namun juga terdapat faktor-faktor lain yang mendukungnya, diakronis dan sinkronis. (Kuntowijoyo, 2013) Tahapan pertama, heuristik, dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam sumber literatur, baik buku, laporan perjalanan, bahkan tulisan-tulisan lepas yang diperoleh dari beberapa perpustakaan, terutama dari Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan UGM Yogyakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan BPNB Sulawesi Utara, dan Arsip Sulawesi di Makassar. Di sisi lain, penulis juga memanfaatkan aplikasi mendeley, serta menggunakan surat kabar kolonial yang diperoleh dari website seperti www.delpher.nl. Tahapan kedua, kritik sumber atau verifikasi

sumber yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dengan topik artikel. Untuk sumber utama dalam kajian ini penulis menggunakan beberapa arsip kolonial dan dibandingkan dengan tradisi lisan yang berkembang di tengah masyarakat. Meski demikian, penulis tetap melakukan seleksi dan perbandingan yang berkorelasi dengan data temuan.

Respon utama dalam artikel ini ialah berusaha menggambarkan proses dan poros terbentuknya jaringan masyarakat di kawasan perbatasan yang terhubung hingga masa kini. Kawasan perbatasan tidak hanya dipandang sebagai batas geografis, namun juga sebagai satu kesatuan kebudayaan dan kultur masyarakat. Di sisi lain, masyarakat perbatasan memahami kesatuan kultur, budaya, dan bahasa adalah perekat alami dalam membangun jejaring dan relasi hingga masa kini.

Jaringan niaga merupakan sebuah konsep yang ditawarkan oleh para sejarawan maritim untuk mengungkapkan dinamika masyarakat yang didorong oleh faktor ekonomi¹⁹. Di sisi lain faktor ideologi, sosial, kebudayaan, hingga politik juga berimplikasi dalam mendorong pertumbuhan jaringan maritim global di masa lalu²⁰. Pada akhirnya aktivitas ini membentuk kelompok komunal dalam bentuk identitas dan entitas masyarakat di kawasan-kawasan pesisir sebagai jalur perniagaan global. Di Nusantara, Kawasan Laut Sulawesi adalah satu ruang bagi para pelaku niaga maritim membentuk identitas dan entitas kebudayaan. Kawasan ini menjadi penting ketika perebutan dominasi Eropa atas jalur rempah ke Maluku sejak abad ke-17 M²¹. Pada akhirnya kawasan Laut Sulawesi menjadi ruang 'pertemuan' yang berperan dalam aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan di masyarakat hingga masa kini.

¹⁹ C. G. Kwa. (2016). The Maritime Silk Road: History of an Idea. *Nalanda-Sriwijaya Centre Working Paper Series*, 23.

²⁰ Artzy, M. (1997). Nomads of the Sea. In *Res Maritimae: Cyprus and the Eastern Mediterranean from Prehistory to Late Antiquity: proceedings of the Second International Symposium 'Cities on the Sea,' Nicosia, Cyprus, October 18-22, 1994* (Vol. 1, pp. 1-16).

²¹ A. B. Lapien. (2004). Laut Sulawesi: The Celebes Sea, from Center to Peripheries. *Moussons*, 7. <https://doi.org/10.4000/moussons>. p. 2445

¹⁸ Pristiwanto. (2017). Dinamika Pisang (Filipina-Sangihe) Di Perbatasan Indonesia-Filipina. *Antropologi Indonesia*, 37(1). <https://doi.org/10.7454/ai.v37i1.8765>; Pristiwanto. (2019). PERUBAHAN LONDE KE PUMPBOAT PERAHU MELINTAS BATAS DI PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya.*, 20(1). <https://doi.org/10.52829/pw.v20i1.135>

Dalam teori budaya, para ahli menunjukkan perbatasan sebagai ruang terbuka dan bebas yang dapat dieksplorasi serta menghasilkan produk baru sebagai sebuah ide. Dalam pandangan ini, ide tersebut dapat berupa identitas, gender, entitas, dalam menghadapi persoalan di tengah masyarakat²².

Berdasarkan pada konseptualisasi di atas, tulisan ini berusaha membahas dua pertanyaan utama dalam artikel ini di antaranya; Bagaimana poros dan proses jejaring niaga maritim di Kawasan Laut Sulawesi? Apa yang melatarbelakangi Kawasan Laut Sulawesi hingga dianggap sebagai daerah *bordersea*? Sejauh Mana peran Laut Sulawesi dalam pembentukan jejaring, kultur, dan relasi agama bagi masyarakat di masa modern?

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Laut Sulawesi: *Melting Pot* dan Kawasan *Entrepot*

Pada kasus Nusantara, jaringan maritim terbentuk melalui perdagangan rempah yang diproduksi di Maluku dan bernilai tinggi di beberapa kawasan, terutama Asia dan Eropa. Jaringan ini dalam catatan sejarah dapat ditemukan dari diskusi para akademisi seperti Lombard²³, Hall²⁴, Lopian²⁵, Poelinggomang²⁶, Zuhdi²⁷, hingga Barus dan Prdjoko²⁸ yang memposisikan Nusantara dalam jaringan maritim global untuk komoditas rempah dari Maluku.

Secara spesifik Kawasan Laut Sulawesi merupakan salah satu daerah yang menjadi

jalur niaga maritim sejak masa niaga di masa lalu. Merujuk pada Lombard (Lombard, 2008) Jaringan Asia merupakan salah satu jalur utama untuk suplai komoditas ke berbagai kawasan. Kesimpulan yang ditawarkan dalam kajian tersebut salah satunya yakni terbentuknya kelompok-kelompok dengan identitas dan entitas sebagai ciri khas dalam dinamika jaringan maritim di Asia. Seturut dengan Lombard, Lopian²⁹ menggunakan konsep yang mirip untuk menunjukkan Kawasan Laut Sulawesi hingga awal abad ke-20. Lopian (2009) kemudian menemukan konsep "Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut" dalam dinamika masyarakat di Kawasan Laut Sulawesi.

Dinamika dan mobilisasi masyarakat di masa itu cukup masif sehingga berimplikasi bagi Nusantara, khususnya di Kawasan Laut Sulawesi. Sejak abad ke-14 M, Kawasan Laut Sulawesi dikenal sebagai salah satu jalur jaringan niaga untuk beberapa kawasan sekitar. Daerah yang berdampak langsung di antaranya adalah Selat Sulu, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Selat Maluku, hingga Teluk Tomini dalam jaringan niaga maritim yang kemudian memposisikan Laut Sulawesi sebagai *melting pot* bagi para pelaut dan peniaga di masa lalu. Aktivitas tersebut membentuk simpul-simpul jaringan berdasarkan kawasan yang mereka singgahi dalam jaringan niaga tersebut.

Ada dua hal yang perlu diungkapkan dalam bagian ini yakni relasi dan dominasi di Kawasan Laut Sulawesi. Relasi yang dimaksudkan di sini adalah keterhubungan para pelaut-peniaga dalam poros jaringan niaga global dari Malaka ke Maluku melalui Laut Sulawesi. Mereka adalah para pelaut-peniaga yang menjadikan Laut Sulawesi sebagai daerah utama dalam lintas niaga. Sedangkan dominasi yang dimaksudkan di sini adalah perebutan peran dan pengaruh dalam hegemoni perniagaan rempah Nusantara. Dalam dominasi ini terdapat kekuatan-kekuatan lokal dan 'asing' yang saling bersinggungan di masa tersebut. Dengan demikian, implikasi utama yang dihasilkan pada kondisi dan aktivitas yang

²² P. Vila. (2003). Ethnography at the Border. *Cultural Studies of the Americas*, 13, 341. <https://doi.org/10.1177/009430610403300639>

²³ Lombard, D. (2005). Nusa Jawa: Silang budaya: Kajian Sejarah Terpadu, bagian I. In *Le Carrefour Javanais*.

²⁴ Hall, Maritime Trade and State Development....

²⁵ A. B. Lopian. (1991). Sejarah Nusantara, Sejarah Bahari. *An Inauguration Ceremony as Professor at the Faculty of Letters UI (University of Indonesia) in Jakarta*.

²⁶ Poelinggomang, Makassar Abad XIX....

²⁷ S. Zuhdi. (2020). Budaya Bahari Sebagai Modal Membangun Negara Maritim Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian ...)*, 8(2).

²⁸ E. Barus & D. Pradjoko. (2021). River trading: Emergence and the rivalry of the middleman trader in Jambi, central Sumatra, 1906-1942. In *Dissecting History and Problematising the Past in Indonesia*.

²⁹ Lopian. (1991). *Sejarah Nusantara...*; Lopian. (2004). *Laut Sulawesi...*

berlangsung adalah kesinambungan kondisi sosial dan relasi masyarakat di masa modern³⁰.

Jika merujuk pada data di atas, maka terdapat dua peran yang berlangsung di Kawasan Laut Sulawesi. Pertama sebagai daerah *melting pot* untuk para pelaut-peniaga dari berbagai etnis dan Kedua sebagai kawasan *entrepot* dalam aktivitas jaringan niaga di Kawasan Laut Sulawesi.

Konsep *melting pot* yang terjadi di Kawasan Laut Sulawesi terlihat ketika keterlibatan para pelaut peniaga yang memanfaatkan jalur niaga ke Maluku. Posisi ini di perkuat ketika munculnya kekuatan lokal yang mampu memobilisasi para pelaut peniaga untuk aktivitas perekonomian. Para pelaut peniaga seperti Arab, Cina, Bugis, Makassar, Maluku, dan Eropa terlibat aktif di Laut Sulawesi dalam aktivitas perpindahan komoditas sampai pada abad ke-20³¹. Kekuatan lokal juga berlaku di daratan, *hinterland*, yang menjadi aktor utama dalam ketersediaan komoditas yang dikapalkan ke berbagai daerah sekitar³².

Meskipun di masa modern kawasan tersebut banyak memperoleh pengaruh dari kolonisasi Eropa, namun daerah tersebut meninggalkan fakta sejarah yang hingga sekarang ini masih bertahan. Terbentuknya pemukiman di daerah pesisir berdasarkan identitas etnis dan agama menjadi salah satu bukti konkrit bahwa kawasan Laut Sulawesi sebagai *melting pot* di masa lalu.

Konsep *entrepot*, meskipun banyak digunakan untuk Singapura dalam jaringan perniagaan di abad ke-19, kawasan Laut

Sulawesi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jejaring yang terbentuk. Jaringan tersebut terbentuk jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa dalam dominasi rempah Maluku. Para pedagang Arab, India, Cina, Melayu, dan Nusantara sudah terlibat aktif dalam peta Kawasan Laut Sulawesi³³. (LeRoy et al., 1906; Pigafetta, 2018)

Pandangan di atas di perkuat melalui beberapa kajian yang memposisikan Laut Sulawesi sebagai *entrepot* dalam jaringan niaga maritim. Dalam catatan ditemukan bahwa pedagang tersebut menggunakan jalur Selat Malaka dan kemudian sebagai aktor yang membuka jalur hingga ke Maluku dalam catatan orang Eropa. Catatan ini juga memperkuat posisi Nusantara, termasuk Laut Sulawesi dalam jaringan komoditas yang berdampak pada beberapa kawasan yang dikenal sebagai *entrepot* dan *port hub* ke Maluku. Tidak hanya sampai di situ, bagian selatan daerah Filipina menjadi salah satu daerah persinggahan bagi para pedagang. Tercatat seorang pedagang Muslim yang menurutnya adalah agen dari Sultan Brunei, juga beberapa saudagar Muslim, pedagang China dan juga Jepang yang saling berhubungan.³⁴

Dengan demikian, Kawasan Laut Sulawesi tidak hanya menjadi jalur lintas niaga, namun juga menjadi wadah dan ruang bagi para pelaut-peniaga dalam mempertahankan keberadaan mereka melalui pertukaran pengaruh, baik budaya dan agama. Pandangan ini juga memperkuat posisi Kawasan Laut Sulawesi sebagai kawasan yang bebas untuk para pelaut-peniaga. (Lapian, 2004)

2. Dari Heartsea ke Bordersea

Sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai posisi Kawasan Laut Sulawesi yang berada pada jalur lalu lintas niaga, sehingga memunculkan dua peran penting kawasan tersebut selama beberapa periode di masa berikutnya. Sejak abad ke-16, Laut Sulawesi dapat dianggap sebagai daerah *heartsea* untuk beberapa daerah di sekitarnya. *Heartsea* yang

³⁰ M. Weber & T. Dmitriev. (2020). The relations of rural community to other branches of social sciences. *Russian Sociological Review*, 19(2). <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2020-2-46-75>

³¹ W. E. Cheong & J. F. Warren. (1982). The Sulu Zone, 1768-1898...

³² D. Henley. (2006). From low to high fertility in Sulawesi (Indonesia) during the colonial period: Explaining the "first fertility transition." *Population Studies*, 60(3). <https://doi.org/10.1080/00324720600896130>; D. Henley & I. Caldwell. (2019). RAJA DAN PERJANJIAN. *LOBO: Annals of Sulawesi Research*, 1(3). <https://doi.org/10.25071/2563-2418.9>; R. KITLV. (2020). Book Reviews. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 161(1). <https://doi.org/10.1163/22134379-90003718>

³³ J. LeRoy, Pigafetta A., & J. A. Robertson. (1906). Magellan's Voyage around the World. *The American Historical Review*, 12(1). <https://doi.org/10.2307/1832899>; A. Pigafetta. (2018). The First Voyage around the World (1519-1522). In *First Voyage Around the World (1519-1522)*. <https://doi.org/10.3138/9781442684928-005>

³⁴ J.C. van Leur. (2015). *Perdagangan dan Masyarakat Indonesia: Esai-Esai Tentang Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia*, Yogyakarta, Ombak. p. 236.

dimaksudkan di sini merujuk pada pandangan kajian maritim mengenai kawasan penghubung antar daratan dalam aktivitas niaga maritim di masa lalu dan juga perpindahan komoditas ke beberapa daerah strategis.(Hall, 2019a) Menariknya, konsep ini berusaha di analogikan untuk Kawasan Laut Sulawesi sebagai daerah penghubung antara Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Maluku, Selat Sulu, Selat Luzon.(Niemeijer, 2004)

Dalam aktivitas ekonomi, kawasan Laut Sulawesi adalah sebuah kawasan bebas yang terbuka bagi para pelaut-peniaga. Mereka memanfaatkan rute niaga tersebut yang tidak hanya terhubung dengan para pedagang asing, namun juga dengan pedagang lokal. Kawasan ini kemudian memunculkan kekuatan ekonomi baru bagi para penduduk yang mendiami kawasan pesisir pantai. Di kawasan Laut Sulawesi ada beberapa etnis yang terlibat dalam jejaring tersebut, termasuk Bajo, Sangihe³⁵, Maluku, Makassar, Bugis, dan para pedagang asing lainnya. Kawasan ini membentuk poros antara Laut Sulawesi, Selat Makassar, dan Laut Jawa. Sedangkan Laut Sulawesi menghubungkan ke Selat Sulu, Selat Maluku, Selat Luzon yang dalam prosesnya menjadi poros penyeimbang jaringan niaga di kawasan utara Nusantara.

Dalam *collective memory* masyarakat di Kepulauan Sangihe, mereka banyak berkisah mengenai relasi Sangihe dan Filipina Selatan. Kisah yang sering dituturkan adalah beberapa tokoh penting di masa lalu seperti Gumansalangi, Samansialang, Mawu Masade', Pendeta Brenteley, hingga aktivitas para perompak dari Mindanao. Meskipun terasa dini untuk menyimpulkan, namun ingatan tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi tutur masyarakat di Kepulauan Sangihe. Dampak keberadaan tokoh tersebut

menunjukkan bahwa kawasan Laut Sulawesi merupakan ruang pertahanan tradisi, kultur, dan kebiasaan masyarakat dan menjadi sebuah warisan yang dapat disebut sebagai *sosiofact*, *mantifact*, hingga *artifact*.

Merujuk pada konsep *heartsea* dan *bordersea*, maka secara tidak langsung terbentuk sebuah jalur alami antar pulau-pulau di Indonesia dan Filipina Selatan. Pemaknaan antara *heartsea* dan *bordersea* muncul di masa kemudian yang tidak lepas dari perebutan pengaruh, dominasi, dan hegemoni, terhadap jalur dan rute niaga ke daerah penghasil rempah, Maluku.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa kondisi kawasan Laut Sulawesi menjadi daerah yang penting pada abad ke-19. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kawasan ini menjadi daerah yang diperebutkan oleh kekuatan lokal dan asing. Di masa itu, Pemerintah Kolonial memposisikan Laut Sulawesi sebagai daerah penghubung untuk pengangkutan komoditas. Kondisi ini memposisikan beberapa daerah di kawasan Laut Sulawesi sebagai daerah pemasok seperti padi dan jagung di Minahasa, penghasil emas, besi, teripang, sisik penyu, sarang burung, kulit kerang, kayu cendana, damar, rotan, dan budak dari Gorontalo dan Banggai. Hal ini pula yang menyebabkan Gorontalo dan Banggai menjadi daerah penting dan menguntungkan bagi para pelaut-peniaga Bugis, Makassar, Mandar, Ternate, Cina, Arab, dan asing lainnya melakukan aktifitas perdagangan.³⁶ Tidak hanya sampai di situ, mereka juga membangun sebuah garnisun dan benteng di beberapa daerah untuk memperkuat posisi mereka. Di Minahasa, mereka mengubah garnisun yang dibangun oleh Spanyol sebagai penjara dan membangun sebuah benteng di pesisir Teluk Manado. Di Gorontalo, pemerintah kolonial membangun benteng pengawas. Bahkan pemerintah kolonial membangun pemukiman model Eropa.

Kondisi di atas membawa dampak besar bagi perkembangan wilayah di awal abad ke-20. Kekuatan asing, selain pemerintah kolonial, juga berusaha merebut dominasi di Kawasan Laut Sulawesi. Inggris dan Amerika sebagai kekuatan baru berusaha menunjukkan keterlibatan mereka di daerah tersebut dalam pembentukan negara modern.

Terbentuknya integrasi kebangsaan tidak lepas pada warisan sejarah yang di masa lalu. Dalam perjalanan Indonesia, pembagian

³⁵ Penyebutan nama *Sangihe* mengalami penyempitan makna di masa modern. Padahal apabila merujuk pada data sejarah, kata *Sangihe* mengidentifikasikan dua entitas yang berbeda yakni Pulau dan Etnis. Pandangan ini diperkuat dari data Pigafetta yang menyebut kata 'Sangiun' sebagai sebuah pulau dalam jurnal perjalanannya menuju Maluku. Di sisi lain, Macpado menyebut *Sangihe* sebagai entitas etnis yakni *Sangil*. Lihat Pigafetta, 1875. *First Voyage Round the World by Magellan*. Boston: The Hakluyt Society, p. 228; Macapado A. Muslim, "The Moro Armed Struggle in the Philippines: the Nonviolent Autonomy Alternative", (Hawaii: University of The Hawaii, 1990), p. 61-62. Dalam artikel ini, penulis menggunakan kata *Sangihe* dengan penekanan kata Pulau *Sangihe* bermakna geografis dan Etnis *Sangihe* bermakna identitas sosial.

³⁶ J. Paulus. (1917) *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, eerste deel*. 's. Gravenhage: Martinus Nijhoff. p. 139.

kawasan tidak lepas dari warisan kolonisasi orang Eropa. Kedaulatan negara, bangsa, dan kebudayaan menjadi sebuah penanda secara internasional. Puncaknya ketika terjadi perjanjian Paris yang mempertegas posisi Laut Sulawesi dan daerah sekitarnya. Meskipun telah dilakukan perjanjian yang mempertegas perbatasan wilayah, namun memunculkan dilema atas wilayah perairan yang dikenal sebagai Zona Ekonomi Eksklusif, ZEE antara Indonesia dan Filipina.

Diplomasi telah dilakukan, namun hingga sekarang ini belum menemukan titik terang dalam kemandirian wilayah regional maritim antara Indonesia dan Filipina. Hal tersebut berimplikasi pada kontestasi antara negara dan masyarakat dalam konstruksi negara dan sosial dan berakhir pada terciptanya 'perbatasan' di Laut Sulawesi-Sulu yang berlanjut hingga saat ini³⁷.

3. Bordersea: Kesamaan Budaya dan Agama

Masyarakat di Nusantara sedikit mengalami perubahan pasca kemerdekaan. Aktivitas mereka mengalami penurunan intensitas akibat munculnya dua negara modern yakni Indonesia dan Filipina. Dengan munculnya dua negara modern, maka terdapat dua persoalan mendasar untuk menjadi perhatian utama bagi dua 'negara' baru tersebut. Pertama persoalan batas wilayah negara yang menjadi pemisah secara geo-politik dan geografis; kedua adalah persoalan rakyat, bangsa, bahasa, dan identitas yang menjadi ciri khas satu negara baru. Oleh karena itu, masalah kedaulatan negara menjadi pertimbangan utama untuk kedua negara yang bertetangga dengan batas-batas wilayah yang harus diperhatikan untuk menjaga keutuhan kedua bangsa dan negara tersebut³⁸.

Secara *de jure* perbatasan di kawasan Indonesia-Filipina tidak lepas dari kesepakatan dua negara atas wilayah-wilayah yang menjadi penanda. Namun berdasarkan aturan *de facto* batas negara yang muncul kemudian mengarah pada 'pembatasan' jejaring dan relasi masyarakat yang menyatu secara kultur. Di Kepulauan Sangihe, Talaud, yang masuk dalam wilayah Indonesia memiliki kultur yang

mirip dengan masyarakat yang mendiami daerah Filipina bagian Selatan, terutama Pulau Balut-Srangani, dan Davao. Kedua kawasan tersebut memiliki banyak kesamaan pada perspektif kultural karena hubungan antar etnis yang masih mempraktikkan warisan sejarah masa lalu dan menjadi keseharian mereka. Salah satu praktik yang masih berlangsung hingga sekarang ini adalah tradisi bahari, teknologi perkapalan, bahasa dan sastra yang kemudian menjadi menjadi satu pengikat dua kultur dan budaya etnis di tengah masyarakat di dua negara tersebut.

Pada praktik di atas aktivitas keseharian, termasuk melaut, masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, mereka menganggap bahwa kawasan laut adalah ruang penyatu dan pengikat tradisi kebaharian mereka. Pandangan ini merujuk pada satu konsep yang menyatakan bahwa daerah maritim dan tradisi bahari adalah penghubung relasi alami apabila dibandingkan dengan daratan³⁹. Dengan demikian, persoalan budaya bahari dalam kehidupan maritim masyarakat bukanlah hal baru di masa sekarang, melainkan sudah menjadi keseharian masyarakat pesisir di masa lalu.

Dalam tradisi lisan masyarakat lokal di kedua negara memunculkan beberapa tokoh yang menjadi 'penghubung' kedua negara bertetangga ini. Tokoh pertama yang dikenal adalah Gumansalangi sebagai representasi sejarah bagi masyarakat etnis Sangihe. Selain Gumansalangi, dikenal juga kisah Mawu Masade' dan Samansialang yang dikenal sebagai tokoh penyebar ajaran Islam di Kepulauan Sangihe dan Filipina Selatan. Sedangkan tokoh lainnya yang dianggap berpengaruh adalah seorang pendeta yang dikenal dengan nama Brenteley. Tokoh-tokoh tersebut sampai sekarang ini masih menjadi perekat sejarah dan ingatan bersama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, Indonesia-Filipina.

Dari dokumen yang diperoleh mengisahkan bahwa seorang keturunan raja bernama Gumansalangi berhasil melarikan diri atas bantuan dua orang sakti bernama, Batahalawo dan Batahasulu ke tempat yang aman. Di tempat persembunyian tersebut, Gumansalangi membangun tempat peristirahatan sementara yang kemudian menjadi tradisi masyarakat di

³⁷ A. agung B. Perwita & I. T. Meilisa. (2018). Co-Operative Maritime Diplomacy: The Resolution Of The Philippines-Indonesia Maritime Border Dispute (1994-2014). *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 7(2). <https://doi.org/10.25077/ajis.7.2.130-148.2018>

³⁸ M. C. Ricklefs. (1993). A History of Modern Indonesia since c. 1300. In *A History of Modern Indonesia since c. 1300*. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-22700-6>

³⁹ Lombard (2008). Nusa Jawa... p. 8.

perbatasan yang dikenal dengan nama *medaseng*.⁴⁰

Ada data lain yang ditunjukkan mengenai relasi di Sangihe dan daerah Filipina Selatan yakni cerita lisan mengenai Pantai Mangindanao yang berhubungan dengan peristiwa heroik para datu di Kepulauan Sangihe dalam menahan serangan orang-orang Mindanao. Penyebutan daerah juga tidak lepas dengan keterhubungan atau bahkan pengaruh dari Filipina Selatan. Selain itu desa Moronge di Kepulauan Sangihe Besar, Kecamatan Tabukan Utara, dianggap memiliki hubungan dengan orang-orang Moro dari Filipina.

Bagitupula dengan pengaruh agama Islam yang dianggap berasal dari Filipina Selatan dibawa oleh seorang tokoh bernama Imam Masade. Mawu Masade' yang juga, dalam ingatan penduduk setempat, berasal dari daratan Filipina. Informasi ini diperoleh di daratan Sangihe Besar yang juga memiliki irisan dengan proses Islamisasi. Menurut penuturan informan pengaruh Islam berawal dari datangnya sosok yang dikenal dengan nama Masade'.

.....kalau berbicara mengenai perbatasan, bukan cuma Gumansalangi, tapi ada juga Masade' yang datang dari Filipina. Dia adalah pembawa ajaran Islam pertama di wilayah ini sebelum orang-orang Maluku datang. Kira-kira tahun 1300-an Masade' datang ke sini. Kalau mau lihat buktinya ada di Pulau Bukide. Masade' punya tiga murid yaitu Hadun, Makung, dan Biangkati setelah tiba di tempat ini....⁴¹

Hal ini dibuktikan oleh keberadaan seorang tokoh Melayu bernama Raja Baginda yang tiba di Sulu dan berhasil mengislamkan penguasa lokal di sana. Selain itu dia juga mengungkapkan bahwa pengaruh ke-Datu-an Islam di Filipina Selatan juga berkembang di bagian Selatan pulau tersebut, Kepulauan Sangihe Besar, melalui orang-orang yang melakukan aktivitas maritim seperti Samal, Tausug, Mindanao, dan Maranao dan sekarang dikenal dengan Bangsamoro atau komunitas Muslim Moro Filipin (Powell & Saleeby, 1979). Oleh karena itu, hubungan di kawasan perbatasan bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah proses dalam poros niaga maritim. Tidak hanya itu, gelar *datu*, dan *kulano*

dalam sistem pemerintahan lokal di Kepulauan Sangihe pada masa lalu juga mengindikasikan adanya pengaruh dari kelompok luar, terutama dari Jolo atau Sulu.

4. Jejaring Identitas dan Entitas Masyarakat Perbatasan

Jejaring masyarakat di kawasan perbatasan menghadapi permasalahan yang beresiko tinggi terhadap hubungan dua negara, Indoneisa-Filipina. Setelah perjanjian, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, UNCLOS 1982, kedua masyarakat mengalami 'pembatasan ruang gerak'. Kedua negara membentuk sebuah garis batas yang dikenal dengan sebutan *bordersea* atau laut menjadi batas teritorial antar kedua negara. Merujuk kamus bahasa Indonesia, kata batas diartikan sebagai 'garis (sisi) yang menjadi perhinggaan suatu bidang (ruang, daerah, dan sebagainya); pemisah antara dua bidang (ruang, daerah, dan sebagainya)'; ketentuan yang tidak boleh dilampaui', sedangkan kata 'perbatasan' diartikan batas; daerah atau jalur pemisah antara unit-unit politik (negara); daerah dekat batas.⁴² Kemudian kata *Sea* dalam kamus bahasa Inggris *sea* dimaknai *The expanse of salt water that covers most of the earth's surface and surrounds its land masses*, untuk kawasan Sulu, Laut Sulawesi, Selat Makassar, dan Selat Maluku di masa perdagangan maritim abad XVI-XIX⁴³.

Munculnya permasalahan dan diskursus ini dikarenakan persepsi *pheriferi* dan *central* dalam menjalankan skala prioritas kebijakan, sehingga seringkali menjadi terabaikan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kawasan *pheriferi* seringkali terabaikan dengan kebijakan-kebijakan pusat, meskipun di satu sisi terdapat kebijakan dari otonomi daerah. Sayangnya, pemerintah daerah juga sering melupakan pentingnya daerah perbatasan, sehingga memunculkan berbagai macam kasus dari tingkat lokal hingga global. Kasus perbatasan khususnya di Indonesia-Filipina, dalam satu dasawarsa kebelakang ditemukan berupa tindakan penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing*, penyelundupan, perompakan hingga jalur transmigrasi, seperti yang terjadi antara Kalimantan-Laut Sulu, Kepulauan Sangihe-Filipina Selatan, serta Natuna-Singapura yang menjadi isu terbaru untuk mempertegas masalah kawasan

⁴⁰ Focus Group Discussion di Tabukan, April 2016.

⁴¹ Informasi dari (Alm.) Opa Cilik di Tabukan April 2017.

⁴² <https://kbbi.web.id/batas> diakses pada tanggal 23 November 2021.

⁴³ Hall. (2019). Maritime Trade...

perbatasan dalam sudut pandang geo-politik, sosial, hingga ekonomi.

Dengan demikian, artikulasi sosial di tengah masyarakat adalah bagian yang tidak lepas dari proses sejarah panjang yang membentuknya.⁴⁴ Jaringan masyarakat yang terikat melalui hubungan etnisitas memperkuat posisi mereka dalam mempertahankan keberadaan mereka. Secara komunal masyarakat memiliki modal utama untuk berinteraksi dan bersosialisasi yakni rasa percaya dan hubungan kultur yang melingkupinya.⁴⁵

Di sisi lain, proses tersebut di dorong oleh berbagi faktor termasuk agama dan ekonomi sehingga masyarakat memiliki perekat satu sama lain. Pembentukan identitas yang dihadapkan pada kesadaran sejarah dan kebudayaan suatu kelompok masyarakat akan berimplikasi pada pengaburan genuinitas yang berdasarkan pada kultur, tadisi, dan kehidupan kolektif yang berlandaskan pada kebudayaan. Formasi tersebut dapat ditelusuri berdasarkan *memory collective* atau rasa kebersamaan yang telah terjalin melalui proses sosio-kultural masyarakat.

Apabila merujuk pada berbagai literatur, konsep kawasan *bordersea* untuk Indonesia di masa modern cukup sulit ditemukan, namun konsep tersebut pernah dimuat dalam satu perjanjian mengenai wilayah batas laut dalam *Treaty of Paris* 1898 yang menjadi satu hasil diplomasi antara Amerika dan Spanyol mengenai Filipina. Meski tidak berdampak langsung bagi Indonesia, namun perjanjian itu dengan tegas memberikan batas wilayah dan geografis Filipina secara geo-politis, yang memuat batas wilayah Filipina baik berupa daratan dan lautan, termasuk batas wilayah air dalam Zona Laut Sulawesi⁴⁶. (Lasquety-Reyes, 2017) Dari kawasan tersebut terjalin relasi sosial yang terbangun dalam aktivitas pada pelaut-peniaga, hingga menjadi bibit entitas dan

identitas dalam cakupan lebih luas. Selain itu entitas tersebut membentuk sebuah label, nama, dan kategori, yang dikenal dengan nama identitas pribadi seseorang dalam satu kelompok⁴⁷.

Selain itu, menurut Week identitas merupakan rekonstruksi dasar dari esensi seseorang individu atau kelompok komunal yang menjadi penanda bagi dirinya dan orang lain. Identitas menjadi penanda yang mendapat pengakuan dari orang atau kelompok lain, sehingga identitas tersebut dibentuk dan dibangun atas dinamika yang terjadi dan melalui proses antara konteks dan situasional yang melingkupinya atau bahkan identitas material atau non material yang membentuknya.⁴⁸

D. KESIMPULAN

Kawasan perbatasan laut terbentuk dikarenakan munculnya negara modern yang membatasi wilayah dan teritorial sebuah kawasan untuk kedaulatan negara dan bangsanya. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa proses dan peristiwa sejarah berimplikasi pada terbentuknya kelompok-kelompok yang tidak mengenal istilah 'batas'.

Di Indonesia dan Filipina Selatan, perbatasan adalah ruang penyatuan bagi etnis Sangihe dan kelompok orang laut yang masih mempraktikkan tradisi bahari dan teknologi perkapalannya. Istilah orang laut di kawasan tersebut lekat dengan praktik jejaring, kultur, dan relasi keagamaan yang mereka bangun sejak masa lalu sehingga bagi mereka tidak ada perbedaan di antara mereka. Di sisi lain, jejaring, kultur, dan relasi agama adalah perekat atas konektivitas satu etnis pada dua negara yang bertetangga.

Faktor ekonomi, agama, dan kebudayaan yang telah terbentuk dari proses panjang

⁴⁴ C. Barker & E. A. Jane. (2016). Cultural Studies Theory and Practice. In SAGE Publications.

⁴⁵ G. J. Ikenberry & F. Fukuyama. (1999). The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of the Social Order. *Foreign Affairs*, 78(5). <https://doi.org/10.2307/20049458>

⁴⁶ J. A. Lasquety-Reyes. (2017). American Education and Filipino Values. *Southeast Asian Schools in Modern History: Education, Manipulation, and Contest*.

⁴⁷ T. N. Basit. (2017). Eastern values; Western milieu: Identities and aspirations of adolescent British Muslim girls. In *Eastern Values; Western Milieu: Identities and Aspirations of Adolescent British Muslim Girls*. <https://doi.org/10.4324/9781315257129>

⁴⁸ J. Rutherford, A. Stuart, K. Mercer, F. Angela, J. Weeks, P. Parmar, Z. Bhimji & S. Watney. (1990). IDENTITY Community, Culture, Difference. *Identity*.

tersebut sebagai perekat dalam membangun entitas dan identitas pribadi maupun komunal. Masyarakat di kawasan perbatasan terus terjalin menjalin relasi melalui berbagai macam aktivitas, baik ekonomi, agama, dan budaya. Perpindahan masyarakat di kawasan perbatasan berdampak pada pola dan jejaring hingga abad modern. Perjanjian geo-politik tidak menjadi penghalang bagi masyarakat di kawasan perbatasan untuk tetap terhubung satu sama lain. Di satu sisi, dua penyebutan atas satu identitas dan entitas etnis memperkuat kondisi tersebut seperti dalam penyebutan Etnis Sangil dan Etnis Sangihe.

Dengan demikian dari pembahasan singkat di atas, masyarakat perbatasan merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara. Mereka memilih untuk menjadi penduduk perbatasan dengan tujuan mempertahankan entitas dan identitas. Artikulasi masyarakat di masa kini tidak lepas dari proses masa lalu yang melingkupinya hingga berimplikasi pada eksistensi jaringan, budaya, dan kultur antar masyarakat⁴⁹ di kawasan perbatasan. Pada hal yang lain, mereka juga membutuhkan ruang untuk bersosialisasi dan berinteraksi, sebagai modal sosial.⁵⁰ Argumentasi yang menunjukkan entitas dan identitas masyarakat akan tetap bertahan meskipun akan menghadapi persoalan yang lebih empiris dalam pandangan politisnya. Dalam perspektif ini, mereka memahami kondisi realitas yang ada, namun hal tersebut adalah hal yang wajar karena bagi mereka Kawasan Laut Sulawesi adalah ruang bersama bagi Indonesia dan Filipina untuk tetap mempertahankan hubungan dua entitas dan identitas yang serupa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya, BPNB, Provinsi Sulawesi Utara yang telah mempercayakan kami untuk

melakukan beberapa kajian di kawasan perbatasan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sejak tahun 2015 hingga 2017. Di samping itu, pula, penulis tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Pristiwanto yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk terus mengkaji kawasan perbatasan. Lebih khusus kepada Guru Penulis, (Opa) Alex J. Ulaen, yang dengan sabar membimbing dan memberikan masukan kepada penulis untuk melihat berbagai perspektif dalam kajian perbatasan. Kepada kawan-kawan di BPNB Sulawesi Utara, khususnya ex-peneliti, yang bersedia menyediakan waktunya untuk berdiskusi bersama penulis di berbagai kesempatan. Untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di Kepulauan Marore, dan Kecamatan Tabukan Utara, semoga kajian dan tulisan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat secara khusus, dan untuk dunia akademis secara umum.

⁴⁹ Chris Barker, 2005. *Cultural Studies: Teori dan Praktek*, Penerjemah Tim Kunci Cultural Studies Center, Yogyakarta: Bentang.

⁵⁰ G. J. Ikenberry & F. Fukuyama. (1999). The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of the Social Order. *Foreign Affairs*, 78(5). <https://doi.org/10.2307/20049458>



REFERENCES

- Andaya, B. W., & Andaya, L. Y. (2015). A History of Early Modern Southeast Asia, 1400–1830. In *A History of Early Modern Southeast Asia, 1400–1830*. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139051323>
- Arsana, I. M. A. (2014). Abd. Rahman Hamid, Sejarah Maritim Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, xiii + 248 pp. ISBN 9786027544840. Price: IDR 50,000 (paperback). *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 169(4). <https://doi.org/10.1163/22134379-12340055>
- Artzy, M. (1997). Nomads of the Sea. In *Res Maritimae: Cyprus and the Eastern Mediterranean from Prehistory to Late Antiquity: proceedings of the Second International Symposium 'Cities on the Sea,' Nicosia, Cyprus, October 18–22, 1994* (Vol. 1, pp. 1–16).
- Barker, C., & Jane, E. A. (2016). Cultural Studies Theory and Practice. In *SAGE Publications*.
- Barus, E., & Pradjoko, D. (2021). River trading: Emergence and the rivalry of the middleman trader in Jambi, central Sumatra, 1906-1942. In *Dissecting History and Problematizing the Past in Indonesia*.
- Basit, T. N. (2017). Eastern values; Western milieu: Identities and aspirations of adolescent British Muslim girls. In *Eastern Values; Western Milieu: Identities and Aspirations of Adolescent British Muslim Girls*. <https://doi.org/10.4324/9781315257129>
- Cheong, W. E., & Warren, J. F. (1982). The Sulu Zone, 1768-1898: The Dynamics of External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State. *The American Historical Review*, 87(5). <https://doi.org/10.2307/1857050>
- Fritze, R. H., & Love, R. S. (2007). Maritime Exploration in the Age of Discovery, 1415-1800. *The Sixteenth Century Journal*, 38(4). <https://doi.org/10.2307/20478689>
- Hall, K. R. (2019a). Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia. In *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv9zckps>
- Hall, K. R. (2019b). Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia. In *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. University of Hawaii Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv9zckps>
- Hall, K. R., & Reid, A. (1994). Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 37(3). <https://doi.org/10.2307/3632261>
- Henley, D. (2006). From low to high fertility in Sulawesi (Indonesia) during the colonial period: Explaining the “first fertility transition.” *Population Studies*, 60(3). <https://doi.org/10.1080/00324720600896130>
- Henley, D., & Caldwell, I. (2019). RAJA DAN PERJANJIAN. *LOBO: Annals of Sulawesi Research*, 1(3). <https://doi.org/10.25071/2563-2418.9>
- Ikenberry, G. J., & Fukuyama, F. (1999). The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of the Social Order. *Foreign Affairs*, 78(5). <https://doi.org/10.2307/20049458>
- KITLV, R. (2020). Book Reviews. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 161(1). <https://doi.org/10.1163/22134379-90003718>
- Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. *Jurnal Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan*.
- Kwa, C. G. (2016). The Maritime Silk Road: History of an Idea. *Nalanda-Sriwijaya Centre Working Paper Series*, 23.
- Lapian, A. B. (1991). Sejarah Nusantara, Sejarah Bahari. *An Inauguration Ceremony as Professor at the Faculty of Letters UI (University of Indonesia) in Jakarta*.
- Lapian, A. B. (2004a). Laut Sulawesi: The Celebes Sea, from Center to Peripheries. *Moussons*, 7. <https://doi.org/10.4000/moussons.2445>
- Lapian, A. B. (2004b). Laut Sulawesi: The Celebes Sea, from Center to Peripheries. *Laut Sulawesi : la mer de Célèbes, un centre devenu périphéries. Moussons*, 7.
- Lapian, A. B. (2018). Peta pelayaran Nusantara dari Masa ke Masa. *Buletin Al-Turas*, 2(3). <https://doi.org/10.15408/bat.v2i5.6764>

- Lasquety-Reyes, J. A. (2017). American Education and Filipino Values. *Southeast Asian Schools in Modern History: Education, Manipulation, and Contest*.
- LeRoy, J. A., Pigafetta, A., & Robertson, J. A. (1906). Magellan's Voyage around the World. *The American Historical Review*, 12(1). <https://doi.org/10.2307/1832899>
- Lombard, D. (2005). Nusa Jawa: Silang budaya: Kajian Sejarah Terpadu, bagian I. In *Le Carrefour Javanais*.
- Lombard, D. (2008). Nusa Jawa: Silang Budaya Bagian II (Jaringan Asia). In *Le Carrefour Javanais*.
- Niel, R. Van, & van Leur, J. C. (1956). Indonesian Trade and Society. Essays in Asian Social and Economic History. *The Far Eastern Quarterly*, 15(3). <https://doi.org/10.2307/2941894>
- Niemeijer, H. E. (2004). A Sea of Histories, a History of the Seas: An Interview with Adrian B. Lopian. *Itinerario*, 28(1). <https://doi.org/10.1017/S0165115300019094>
- Non, D. M. (1993). Moro piracy during the Spanish period and its impact. *Southeast Asian Studies (Kyoto)*, 30(4). https://doi.org/10.20495/tak.30.4_401
- Paulus. J. (1917) Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, eerste deel.'s. Gravenhage: Martinus Nijhoff. p. 139.
- Perwita, A. agung B., & Meilisa, I. T. (2018). CO-OPERATIVE MARITIME DIPLOMACY: THE RESOLUTION OF THE PHILIPPINES-INDONESIA MARITIME BORDER DISPUTE (1994-2014). *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 7(2). <https://doi.org/10.25077/ajis.7.2.130-148.2018>
- Pigafetta, A. (2018). The First Voyage around the World (1519–1522). In *First Voyage Around the World (1519-1522)*. <https://doi.org/10.3138/9781442684928-005>
- Poelinggomang, E. L. (2016). Makassar Abad XIX. In *Makassar Abad XIX*.
- Powell, I. B., & Saleeby, N. M. (1979). Studies in Moro History, Law and Religion. *Pacific Affairs*, 52(1). <https://doi.org/10.2307/2757800>
- Pristiwanto, P. (2017). Dinamika Pisang (Filipina-Sangihe) Di Perbatasan Indonesia-Filipina. *Antropologi Indonesia*, 37(1). <https://doi.org/10.7454/ai.v37i1.8765>
- Pristiwanto, P. (2019). PERUBAHAN LONDE KE PUMPBOAT PERAHU MELINTAS BATAS DI PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 20(1). <https://doi.org/10.52829/pw.v20i1.135>
- Ricklefs, M. C. (1993). A History of Modern Indonesia since c. 1300. In *A History of Modern Indonesia since c. 1300*. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-22700-6>
- Rutherford, J., Stuart, A., Mercer, K., Angela, F., Weeks, J., Parmar, P., Bhimjl, Z., & Watney, S. (1990). IDENTITY Community, Culture, Difference. *Identity*.
- Shumway, R. (2005). Jack Turner, Spice: The History of Temptation. New York, NY: Alfred A. Knopf, 2004. 384 pp. ISBN: 0-375-40721-9 (hbk); 0-375-70705-0(pbk). *Itinerario*, 29(3). <https://doi.org/10.1017/s0165115300010615>
- Spice: the history of a temptation. (2005). *Choice Reviews Online*, 42(09). <https://doi.org/10.5860/choice.42-5243>
- Tirtosudarmo, R. (2014). Kalimantan Barat sebagai 'Daerah Perbatasan': Sebuah Tinjauan Demografi-Politik. *Antropologi Indonesia*, 0(67). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i67.3427>
- Ulaen, A. J. (2017). LAUT YANG MENYATUKAN: MENGUNGKAP RUANG-JEJARING LAUT MALUKU. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 12(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.34050/jlb.v12i2.3046>
- Vila, P. (2003). Ethnography at the Border. *Cultural Studies of the Americas*, 13, 341. <https://doi.org/10.1177/009430610403300639>
- Warren, J. (1979). The Sulu Zone : Commerce and the Evolution of a Multi-ethnic Polity, 1768-1898. *Archipel*, 18(1). <https://doi.org/10.3406/arch.1979.1512>
- Warren, J. F. (2018). In the name of sovereignty: Spain's tackling of "Moro" piracy in the Sulu zone, 1768-1898. In *European Expansion and Indigenous Response* (Vol. 29). <https://doi.org/10.1163/9789004361485-008>
- Weber, M., & Dmitriev, T. (2020). The relations of rural community to other branches of social sciences. *Russian Sociological Review*, 19(2). <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2020-2-46-75>
- Zuhdi, S. (2020). Budaya Bahari Sebagai Modal Membangun Negara Maritim Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian ...)*, 8(2).

Wawancara Informan:

(Alm.) Opa Cilik, 65 tahun di Tabukan April 2017.

Opa Sabu, 67 tahun, Marore, 2014.

Oma Barahama, 70 tahun, Marore, 2016.